

PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) PADA MASA PANDEMI COVID-19 TAHUN 2021 DI KOTA CIMAHI (STUDI PADA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN KOTA CIMAHI)

¹Ihdina Hanif

²Wahju Gunawan

³Ivan Darmawan

¹Program Studi Administrasi Pemerintahan, Universitas Padjadjaran

²Departemen Sosiologi, Universitas Padjadjaran

³Departemen Ilmu Pemerintahan, Universitas Padjadjaran

Email korespondensi : hanif.ihdina@gmail.com

ABSTRACT

The COVID-19 pandemi has greatly affected all aspects of life in society, including the economy. Micro, Small and Medium Enterprises are feeling the impact of the pandemi. Seeing these conditions, the Cimahi City Government empowers MSME actors so that they can rise and survive during the pandemi. The Cimahi City Government, in this case the Industry and Trade Ministry, empowers MSME actors by performing various roles. The purpose of this study is to examine and describe how the Government's Role in Empowering Micro, Small and Medium Enterprises during the 2021 Covid-19 Pandemi in Ciamhi City in terms of the theory of the government's role in community empowerment according to Soares, A., Nurpratiwi, R & Makmur , M which is seen from four aspects, namely the role of entrepreneur, koordinator, fasilitator and stimulator. The method used is descriptive research with qualitative methods. Based on the results of the study, the government's role in empowering MSMEs during the Covid-19 pandemi was quite good because the government made various efforts to raise MSMEs during the pandemi, starting from training, capital support to facilitation of business legality. However, there are still some things that need to be evaluated and optimized, such as not yet fully running because there are still many MSMEs that have not participated in programs organized by the government and the provision of material has not been systematized so that there are still many business actors who do not know how to start and run a business. This is something that needs to be improved in the future so that the MSME empowerment program during the pandemi in Cimahi City is even better.

Keywords: Covid-19 pandemi, Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), Entrepreneur, Koordinator, Fasilitator, Stimulator

ABSTRAK

Pandemi Covid-19 sangat memengaruhi segala aspek kehidupan di masyarakat termasuk dalam bidang ekonomi. Usaha Mikro Kecil dan Menengah ikut merasakan dampak akibat adanya pandemi tersebut. Melihat kondisi tersebut, Pemerintah Kota Cimahi melakukan pemberdayaan kepada para pelaku UMKM agar mereka dapat bangkit dan bertahan pada masa pandemi. Pemerintah Kota Cimahi dalam hal ini Disdagkoperin melakukan pemberdayaan kepada para

pelaku UMKM dengan melakukan berbagai peran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan mendeskripsikan bagaimana Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada masa Pandemi Covid-19 Tahun 2021 di Kota Ciamhi ditinjau dari teori peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat menurut Soares, A., Nurpratiwi, R & Makmur, M yang dilihat dari empat aspek yaitu peran sebagai *entrepreneur*, koordinator, fasilitator dan stimulator. Metode yang digunakan yaitu penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, peran pemerintah dalam pemberdayaan UMKM pada masa pandemi Covid-19 sudah cukup baik karena pemerintah melakukan berbagai upaya untuk membangkitkan UMKM pada masa pandemi mulai dari pelatihan, dukungan modal hingga fasilitasi-fasilitasi legalitas usaha. Namun masih ada beberapa hal perlu dievaluasi dan dioptimalkan dikarenakan masih banyak UMKM yang belum mengikuti program yang diselenggarakan pemerintah dan pemberian pematerian yang belum tersistemasi sehingga masih banyak pelaku usaha yang belum mengetahui bagaimana cara untuk memulai dan menjalankan usaha. Hal tersebut yang kedepannya perlu diperbaiki agar program pemberdayaan UMKM pada masa pandemi di Kota Cimahi lebih baik lagi.

Kata Kunci : Pandemi Covid-19, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Entrepreneur, Koordinator, Fasilitator, Stimulator

PENDAHULUAN

Di Indonesia peran usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) telah lama diakui sebagai sektor usaha yang sangat penting, dikarenakan sampai saat ini masih menjadi sumber penyokong utama perekonomian masyarakat kecil dan menengah. Menurut data Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (KUKM) tahun 2019, jumlah pelaku UMKM sebanyak 65,46 juta atau 99,99% dari jumlah pelaku usaha di Indonesia. Daya serap tenaga kerja UMKM adalah sebanyak 119,5 juta pekerja atau 96,92% dari daya serap tenaga kerja dunia usaha. Sementara itu kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional dalam Pendapatan Domestik Bruto (PDB) sebesar 60,51%, dan sisanya yaitu 39,49% disumbangkan oleh pelaku usaha besar yang jumlahnya hanya sebesar 5.637 atau 0,01% dari jumlah pelaku usaha.¹

Keberadaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga terbukti memiliki

resiliensi yang tinggi dalam situasi krisis. Keberhasilan pengembangan UMKM dalam bertahan pada masa krisis dapat dilihat pada era krisis ekonomi tahun 1997 yang terjadi di Indonesia. Saat itu banyak perusahaan-perusahaan besar yang bangkrut hingga gulung tikar, tetapi UMKM mampu bertahan dan bahkan semakin banyak perkembangannya di masyarakat. Dibuktikan dengan adanya kenaikan serapan tenaga kerja oleh UMKM pada masa setelah terjadi krisis. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 1997 jumlah tenaga kerja UMKM pada tahun 1997 sebanyak 65.601.591 juta jiwa, lalu turun sebesar 1,96% pada tahun 1998 tetapi kembali naik sebesar 4,44% pada tahun 1999 menjadi 67.169.844 jiwa.

Kondisi krisis ternyata memberikan pula efek positif dalam pengembangan UMKM, dikarenakan kondisi tersebut memunculkan kesadaran kepada masyarakat untuk senantiasa berjuang dan memotivasi diri dalam membuka peluang kerja sendiri dengan berwirausaha. Keputusan sebagian

¹ Portal website Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam

www.kemenkopukm.go.id diunduh tanggal 14 Juli 2021

masyarakat yang menjadi wirausaha dipengaruhi oleh dua hal yaitu kondisi dan motivasi. Situasi tertekan tersebut menciptakan adanya perubahan tindakan yang menyebabkan seseorang mengambil keputusan untuk bertanggung jawab atas dirinya sendiri dengan berwirausaha, sehingga menjadikan jumlah usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) pada saat itu cenderung mengalami kenaikan.

Kontribusi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Kota Cimahi pun tinggi. Kota Cimahi yang memiliki potensi besar pertumbuhan ekonomi dari sektor perdagangan dan industri, menyebabkan banyak UMKM yang tumbuh di kota ini. Sektor Industri Pengolahan menyumbang sedikitnya 15,37 Triliun Produk Domestik

Regional Bruto (PDRB) Kota Cimahi Tahun 2020 dan merupakan jumlah terbesar diantara sektor menurut lapangan usaha yang lainnya. Sehingga, UMKM telah memiliki kontribusi yang besar dalam membantu perekonomian di Kota Cimahi dengan terbukti dapat meningkatkan PDRB dan penyerapan tenaga kerja non-pendidikan formal (*Unskilled*).

Jumlah perusahaan industri berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) kota Cimahi pada tahun 2021 terdiri dari PT (Perseroan Terbatas) sebanyak 240 perusahaan, CV/Firma sebanyak 74 perusahaan, perorangan sebanyak 1367 perusahaan dan lainnya sebanyak 74 perusahaan dengan total jumlah perusahaan industri yang ada di Kota Cimahi sebanyak 1755 perusahaan.

Tabel 1.1 Jumlah Perusahaan Industri di Kota Cimahi, Tahun 2018-2020

Kecamatan <i>Subdistrict</i>	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
PT	-	-	240
CV/Firma	-	-	74
Perorangan	905	636	1367
Lainnya	-	-	74
Kota Cimahi	905	636	1755

Sumber : BPS Kota Cimahi, 2021

Berdasarkan data-data yang ada berkaitan dengan perkembangan industri di Kota Cimahi. Pemerintah melalui Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian (Disdagkoperin) membuat beberapa program pengembangan melalui gerakan pemberdayaan untuk meningkatkan kualitas dari usaha-usaha masyarakat yang ada di Kota Cimahi. Beberapa program yang telah dilakukan diantaranya program Kelompok Usaha Bersama (KUBE), pelatihan-pelatihan/seminar, fasilitas dalam pemasaran, pemberian sertifikasi halal, pengemasan produk dan pendampingan Rumah Desain

dan Kemasan Cimahi (RDKS). Tetapi, belum semua pelaku UMKM dapat terdata dan diberikan pemberdayaan oleh Pemerintah Kota Cimahi.

Data yang terhimpun dengan benar dan akurat merupakan salah satu unsur yang melandasi keberhasilan dalam sebuah program pemberdayaan UMKM di Kota Cimahi. Sampai saat ini, jumlah UMKM yang terdaftar di Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Cimahi masih sangat dinamis dan belum terhimpun dengan pasti. Terlebih pada tahun 2021 ini banyak juga UMKM yang gulung tikar dikarenakan

situasi pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia hingga dirasakan juga di Kota Cimahi.

Pandemi Covid-19 (*Corona Virus Disease – 19*) yang melanda berbagai negara di dunia termasuk di Indonesia menyisakan dampak yang luar biasa dalam berbagai sektor kehidupan diantaranya pada sektor ekonomi. Indonesia sebagai negara berkembang sangat merasakan dampak yang diakibatkan oleh pandemi ini. Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan memperkirakan angka kerugian hingga Rp320 triliun pada Triwulan I-2020 akibat terjadinya pandemi ini. Terbukti dengan adanya Berita Resmi Statistik No.39/05/Th. XXIII, pada tanggal 5 mei 2020, besaran Pendapatan Domestik Bruto (PDB) triwulan I-2020 mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi sebanyak 2,10 persen.

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sebagai penyumbang terbesar dalam PDB Indonesia sangat merasakan dampak dari adanya pandemi Covid-19 ini. Dalam situasi ini, resiliensi UMKM diuji kembali untuk bisa melewati kondisi krisis yang melanda Indonesia. Terlebih dengan adanya kebijakan *Physical* dan *Social Distancing* yakni himbauan untuk menjaga jarak sosial dan jarak fisik yang membatasi mobilitas masyarakat dan akan berdampak pada perlambatan aktivitas ekonomi sehingga akan memengaruhi perilaku masyarakat dalam memenuhi kebutuhan (*supply and demand*). Para pelaku UMKM yang selama ini hanya mengandalkan penjualan dengan tatap muka atau pertemuan antara penjual dan pembeli akan mengalami keterbatasan dalam memasarkan produk dan menurunkan penjualan.

Berdasarkan hasil survei Bank Indonesia dari 2970 UMKM yang telah disurvei, terdapat 87,5% atau 2600 UMKM yang terdampak negatif pandemi Covid-19 ini. Dari jumlah tersebut, 93,2 % terdampak dari sisi penjualan. Sebanyak 16,2% UMKM yang terdampak mengalami penurunan penjualan hingga 25%. Lalu, 40 % UMKM mengalami penurunan penjualan hingga 25-50%, 28,2% UMKM mengalami penurunan penjualan 51-75% dan 15,6% UMKM penjualannya anjlok di atas 75%. Adapun sebanyak 64,2% UMKM yang terdampak telah menerapkan strategi meminimalisasi dampak pandemi. Sementara itu, tercatat 52,1% UMKM tidak terkorporatisasi dan 35,5% terkorporatisasi.²

Kendala yang dialami oleh para UMKM pada masa pandemi Covid-19 ini berdasarkan survey beberapa lembaga diantaranya seperti Bappenas, BPS dan World Bank ialah pandemi ini menyebabkan UMKM banyak yang kesulitan melunasi pinjaman hutang, kesulitan membayar listrik dan membayar gaji karyawan, sehingga banyak UMKM yang melakukan PHK. Tak hanya itu, beberapa kendala lain pun dirasakan oleh para UMKM seperti kesulitan dalam memperoleh bahan baku, kesulitan dalam mendapatkan bantuan peningkatan modal, kesulitan dalam pendistribusian dan produksi barang dikarenakan penetapan kebijakan pembatasan kegiatan, dan turunnya jumlah pembeli karena perubahan perilaku konsumen yang mulai menerapkan belanja digital sedangkan banyak pula UMKM yang belum menerapkan digitalisasi.

Adanya peningkatan penyebaran kasus Covid-19 di Indonesia ini membuat banyak UMKM yang belum siap menghadapinya baik secara strategi bisnis, kesiapan mental

² Dalam www.katadata.co.id pada Artikel “ Hanya 12,5% UMKM di Indonesia yang Kebal dari Pandemi Covid-19” tanggal 26 Maret 2021

maupun kesiapan sumberdaya untuk menghadapi situasi normal baru atau *new normal* dalam masa pandemi Covid-19 ini. Dari kondisi tersebut terlihat bahwa mayoritas pelaku sektor usaha mikro, kecil dan menengah ialah masyarakat kelas menengah ke bawah dan hanya sebagian pelaku usaha yang mampu bertahan mengembangkan usahanya. Para pelaku usaha yang mampu sukses bertahan di era pandemi ini merupakan perusahaan yang mampu beradaptasi dengan kondisi, yaitu mereka yang melakukan inovasi salah satunya dengan digitalisasi.

Penyebaran virus Covid-19 yang terus meluas hingga berbagai daerah di Indonesia dan sampai pada Kota Cimahi. Terhitung sejak 22 maret 2020, mulai ditemukan kasus Covid-19 pertama di Kota Cimahi, hal itu disampaikan oleh Walikota Cimahi pada saat itu yakni Ajay M. Priatna. Dengan kemunculan kasus positif pertama di Kota Cimahi tersebut, Pemerintah Kota Cimahi pun meningkatkan status siaga Covid-19 dan melarang adanya perkumpulan massa. Pemerintah Kota Cimahi menyatakan bahwa mengikuti rekomendasi dari *World Health Organization* (WHO), pihaknya mengimbau masyarakat untuk melakukan *Social Distancing* untuk mengurangi kegiatan di luar rumah minimal selama 14 hari untuk meminimalisasi penyebaran kasus Covid-19 khususnya di wilayah Kota Cimahi.

Dalam konteks penanganan terhadap dampak pandemi Covid-19 pada sektor ekonomi, pemerintah pusat menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam rangka mendukung kebijakan keuangan Negara untuk penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional. Kebijakan

tersebut juga salah satunya dibuat guna membantu meringankan beban dan mendampingi para pelaku usaha saat menghadapi pandemi ini.

Untuk mendukung program dari pemerintah pusat, pada tingkat pemerintahan daerah pun mengeluarkan berbagai kebijakan-kebijakan dan beberapa program bantuan sebagai *stimulan* para pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya pada masa Pandemi Covid-19. Serta melihat dari fenomena meningkatnya usaha-usaha mikro kecil baru yang tumbuh setelah adanya masa krisis, menjadi acuan agar pemerintah dapat menumbuhkan para pelaku usaha mikro kecil yang baru saat pandemi Covid-19 ini terjadi. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya dirasa masih belum memberikan dampak yang terlihat dalam mempertahankan keberadaan UMKM di wilayah Kota Cimahi, dikarenakan masih banyak UMKM yang mengalami kerugian bahkan hingga gulung tikar. Sehingga diduga Pemerintah Kota Cimahi kurang memberikan perhatian serius dan kurang memberikan program pemberdayaan yang tepat dalam kondisi pandemi Covid-19 ini.

Sesuai dengan yang tertera pada pasal 12 ayat 2 huruf g Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang menjadi urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar ialah pemberdayaan masyarakat dan desa. Selanjutnya, tertera pada pasal 1 ayat 7 Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Cimahi yang menyebutkan bahwa Perangkat Daerah (PD) adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Wujud pelaksanaan dalam pencapaian visi dan misi Kota Cimahi dan juga

pelaksanaan urusan wajib pemerintahan daerah dalam melakukan pemberdayaan, maka Pemerintah Kota Cimahi melalui Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian (Disdagkoperin) melaksanakan berbagai program pemberdayaan untuk para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang ada di Kota Cimahi. Program pemberdayaan tersebut telah dilakukan dari masa pemerintahan-pemerintahan sebelum pandemi Covid-19 ini melanda.

Program pemberdayaan yang telah dilakukan sebelumnya oleh Pemerintah Kota Cimahi yaitu dengan membentuk petugas lapangan sebanyak 10 orang di setiap kelurahan yang bertugas menampung permasalahan dan aspirasi para pelaku UMKM sebagai wujud peran pemerintah sebagai koordinator, bantuan pengajuan sertifikasi halal dan pendaftaran HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual), *workshop*

Ketahanan UMKM dalam masa krisis tentunya dipengaruhi oleh beberapa aspek baik dari pelaku UMKM itu sendiri maupun dari pemerintah. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, diketahui bahwa UMKM cenderung mampu lebih bertahan dalam kondisi krisis dibandingkan dengan jenis usaha lainnya. Masa krisis yang dapat dilewati oleh UMKM contohnya pada saat Indonesia mengalami krisis moneter di tahun 98 terdahulu, dari situlah terlihat UMKM yang dapat membangkitkan ekonomi Indonesia memiliki pengaruh yang sangat besar. Dalam kondisi saat ini, krisis yang dialami sedikit berbeda dikarenakan berawal dari sebuah virus yang notabene menyasar kesehatan manusia, tetapi pada realitanya menyerang juga perekonomian bangsa. Hal tersebut menciptakan tantangan

pengelolaan *website* pemasaran, pemberian sertifikasi halal, dan bantuan proses pengemasan produk melalui Rumah Desain Kemasan Kota Cimahi (RDKC) yang menunjukkan adanya fasilitasi dari pemerintah terhadap para pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya.

Berdasarkan informasi awal dari Kepala Bidang UMKM dan Koperasi Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Cimahi, pandemi Covid-19 yang sudah berjalan satu tahun lebih di Kota Cimahi hingga saat ini menyebabkan setidaknya 30% atau sebanyak 13 ribu dari kurang lebih 44 ribu UMKM yang ada di Cimahi mengalami gulung tikar pada tahun 2020. Penyebabnya karena UMKM yang bergerak di berbagai sektor itu tak dapat bertahan dari gempuran pandemi Covid-19 yang menghantam seluruh daerah di Indonesia ini.³

baru bagi para pelaku UMKM dan bagi pemerintah untuk dapat menyelesaikan tantangan ini. Maka dari itu, fungsi dan peran pemerintah dalam melayani masyarakat teruji. Dalam menyelesaikan persoalan ini dibutuhkan kerjasama antara pelaku UMKM dan pemerintah, dan peran pemerintah dalam membantu UMKM sangatlah dibutuhkan. Usaha pemerintah yang dapat dijalankan yakni terlihat dari perannya sebagai entrepreneur, koordinator, fasilitator dan stimulator dalam pemberdayaan bagi masyarakat, khususnya para pelaku UMKM.

Dalam melakukan pemberdayaan terhadap para pelaku UMKM, pemerintah dapat melaksanakan peran-perannya seperti yang disampaikan oleh Soares, A., Nurpratiwi, R & Makmur, M yakni sebagai

³ Wawancara dengan Kepala Bidang UMKM dan Koperasi Kota Cimahi Tahun 2021 dalam

www.News.detik.com pada artikel “Gegara Pandemi Covid-19, 13 ribu UMKM di Cimahi Gulung Tikar” tanggal 27 Mei 2021

entrepreneur, koordinator, fasilitator dan stimulator. Teori ini penulis gunakan dalam melakukan pengamatan pada peran pemerintah dalam pemberdayaan UMKM pada penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian deskriptif dengan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara nyata keadaan yang sebenarnya terkait situasi subjek perilaku atau fenomena yang terjadi serta informasi yang mendukung secara deskriptif dengan cara mengamati permasalahan secara sistematis dan akurat terhadap suatu fakta dan sifat objek tertentu terkait dengan peran pemerintah dalam pemberdayaan UMKM pada masa pandemi Covid-19 di Kota Cimahi. Untuk teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu berupa studi pustaka dengan mengeksplor berbagai buku, jurnal, dan berbagai sumber lain yang berkaitan dengan penelitian dan studi lapangan yang berupa wawancara (pedoman wawancara), observasi, serta dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini juga dilengkapi dengan identifikasi SWOT.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan UMKM Sebagai *Entrepreneur*

Tumbuhnya keinginan membuka usaha baru dipengaruhi oleh peran pemerintah dalam memotivasi masyarakatnya. Banyak para pelaku usaha yang berhenti di tengah jalan karena salah satu alasannya ialah merasa kurang ilmu dan tidak ada perkembangan dalam usahanya. Penting bagi pemerintah untuk berperan dalam hal ini agar dapat memberikan

pemahaman bagaimana masyarakat untuk memulai sebuah usaha.

Disdagkoperin Kota Cimahi membuat program Wirausaha Baru atau yang disingkat WUB sebagai bentuk untuk menumbuhkembangkan jumlah wirausaha baik secara kualitas maupun secara kuantitas di Kota Cimahi. Program tersebut termasuk di dalam Rencana Kerja Disdagkoperin yang sudah berjalan sejak tahun 2017, namun pada praktiknya memiliki perubahan-perubahan secara teknis pelaksanaan setiap tahunnya mengikuti dengan adanya perubahan-perubahan keadaan yang terjadi termasuk diantaranya ketika pandemi Covid-19 melanda di Indonesia juga di Kota Cimahi.

Perubahan tersebut yang awal mulanya banyak kegiatan yang dilakukan secara langsung atau *luring*, pada saat pandemi berubah menjadi kegiatan secara *daring*. Termasuk pada pola kegiatan jual-beli yang kini banyak dilakukan secara *online/daring*. Oleh karena itu, kini masyarakat sedang berlomba untuk beradaptasi dan melakukan perubahan, dalam hal ini khususnya para pelaku usaha kecil dan menengah, mereka mulai memasarkan produk secara *online* melalui *platform-platform digital*.

Tidak hanya itu saja, Disdagkoperin Kota Cimahi mencoba untuk menyesuaikan dengan mengadakan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Adapun selain memberikan pelatihan kepada para pelaku usaha baru, Disdagkoperin juga membuat pendampingan dan fasilitasi kebutuhan lainnya secara khusus kepada para pelaku usaha kecil dan menengah yang ikut bergabung dalam program WUB tersebut. Para pelaku usaha baru yang tergabung dalam program WUB ini terbagi kedalam dua kategori, yakni pelaku usaha baru yang secara waktu baru muncul sebagai pelaku usaha pada saat masa Pandemi Covid-19 dan

juga para pelaku yang usahanya sudah ada sejak dulu, namun baru akan berkembang usahanya

Program Wirausaha Baru (WUB) yang dijalankan oleh Disdagkoperin Kota Cimahi tidak hanya berfokus kepada para pelaku usaha yang baru muncul saja, namun menumbuhkan kembali para pelaku usaha yang sudah lama untuk dapat berkembang lebih baik lagi. Disamping itu, selain memberikan pelatihan atau *workshop*, Disdagkoperin dalam program WUB juga memfasilitasi hal-hal yang berkaitan dengan legalitas usaha para pelaku usaha baru agar dapat menembus pasar apabila legalitasnya terpenuhi. Kemudian, pada program ini juga diajarkan dasar-dasar dalam membangun bisnis seperti halnya cara membuat katalog, cara bertemu klien dan lain sebagainya. Hal yang membedakan pembinaan kepada para pelaku usaha baru yang tergabung dalam WUB dengan para pelaku usaha yang sudah lebih dahulu berdiri di Kota Cimahi ialah adanya petugas pendamping khusus yang datang melalui *home visit* atau kunjungan langsung kepada para pelaku usaha baru. Para petugas tersebut dipilih dari kalangan pelaku usaha yang sudah maju dan mandiri yang ada di Cimahi, melalui seleksi khusus yang kemudian bertugas mendampingi para pelaku usaha baru yang tergabung kedalam WUB.

Setiap tahap yang dilakukan oleh para pelaku usaha baru secara berjenjang dan bertahap, juga dengan adanya pendampingan dari pemerintah melalui pendamping WUB, merupakan bentuk perlakuan Disdagkoperin dalam mewujudkan perannya. Pelaku usaha baru yang tergabung dalam WUB, akan dapat mengetahui dari awal langkah-langkah untuk memulai usaha, sedangkan bagi para pelaku usaha yang sudah lama namun baru mulai berkembang akan dapat memperbaiki usahanya terlebih pada masa pandemi Covid-19 ini. Hal tersebut menunjukkan bahwa

peran Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian Kota Cimahi dalam memberdayakan usaha mikro kecil dan menengah sebagai *entrepreneur* pada masa pandemi Covid-19 ini sudah tercapai dengan baik. Karena melihat perubahan dengan adanya para pelaku usaha baru yang sudah menerapkan keilmuannya dalam menjalankan usahanya yang akan menarik perhatian masyarakat lainnya untuk juga memulai usaha karena masyarakat tidak merasa kebingungan lagi ketika akan memulai usaha juga bagi mereka yang baru memulai usaha dapat dengan siap mengembangkan usahanya.

Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan UMKM Sebagai Koordinator

Koordinator disini berarti pemerintah melaksanakan perannya sebagai pemersatu, yang menintegrasikan semua elemen yang berhubungan dengan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah pada masa pandemi Covid-19 untuk senantiasa memberikan kesatuan dalam aktivitas dan usaha sehingga bisa mencapai tujuan bersama. Pada dasarnya Disdagkoperin Kota Cimahi dalam melakukan pemberdayaan tidak dapat dilakukan sendiri seperti yang disebutkan pada bab sebelumnya. Ada beberapa *stakeholder* yang terlibat didalam melakukan pemberdayaan UMKM pada masa pandemi Covid-19 baik dari masyarakat itu sendiri maupun pihak lain seperti swasta, lembaga-lembaga pelatihan, organisasi-organisasi kemasyarakatan dan lainnya. Dalam menjalankannya dibutuhkan koordinasi agar semua satu tujuan.

Adanya koordinator-koordinator UMKM di Kota Cimahi sebagai bentuk kemudahan dalam alur komunikasi. Dalam berkomunikasi yang membantu masyarakat untuk dapat mengetahui segala informasi mengenai program pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah yang dilakukan

oleh Disdagkoperin Kota Cimahi. Adanya koordinator UMKM ini dibentuk oleh pemerintah dengan memilih UMKM yang aktif dan memiliki usaha yang baik berjalan yang ada di masing-masing kelurahan di Kota Cimahi.

Dengan adanya koordinator UMKM, masyarakat tidak perlu khawatir tertinggal informasi adanya program-program yang diadakan oleh pemerintah. Koordinator ini bermanfaat bagi kedua pihak, baik pemerintah maupun anggota UMKM di daerah itu sendiri. Hal lain juga diketahui dengan adanya koordinator UMKM, para pelaku UMKM lebih berani menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah, keluhan-keluhan dan kendala yang dirasakan.

Melihat dari pembahasan sebelumnya bahwa selama masa pandemi Covid-19 banyak kegiatan dan metode-metode yang dilakukan secara *online* atau daring, begitupun dengan pendataan UMKM, pendaftaran program-program yang diikuti oleh UMKM banyak yang dilakukan secara *online*. Namun, masih banyak juga UMKM yang belum mengerti mengenai teknologi. Kurangnya kecakapan dari beberapa pelaku usaha untuk mengoperasikan teknologi menjadi tantangan bagi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Cimahi. Dari ribuan UMKM, tentunya tidak bisa diajarkan individu per individu dalam mengoperasikan teknologi. Maka, disini pemerintah dibantu oleh para koordinator UMKM untuk senantiasa memfasilitasi UMKM lainnya. Para koordinator UMKM membantu pemerintah dalam mengarahkan dan membimbing para pelaku UMKM anggotanya untuk mengikuti program-program yang diselenggarakan oleh pemerintah, melihat kendala-kendala yang terjadi, dan membantu hal-hal teknis yang mungkin ditemui dilapangan seperti misalnya memberikan arahan kepada para pelaku

usaha yang masih belum bisa menjalankan teknologi.

Sebagai bentuk memenuhi perannya sebagai koordinator, Disdagkoperin juga senantiasa melakukan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara rutin setiap bulan bersama para pendamping dan para pelaku usaha. Disdagkoperin berusaha untuk terus melakukan evaluasi untuk perubahan yang lebih baik dengan melibatkan *stakeholder* dengan melakukan koordinasi-koordinasi. Dengan kata lain, melalui koordinasi segala bentuk kekurangan dan kendala dapat dilakukan perbaikan untuk menyempurnakan hasil yang diharapkan. Adanya para koordinator dapat membantu Disdagkoperin untuk menjangkau lebih banyak dan lebih dekat lagi kepada setiap pelaku usaha.

Dengan adanya pembatasan-pembatasan sosial pada masa pandemi Covid-19 membuat masyarakat menjadi terbatas ruang gerakannya, namun dengan adanya koordinator para pelaku UMKM dapat dengan mudah menerima informasi, mudah bertanya dan mudah untuk menyampaikan aspirasi. Pada dasarnya pemberdayaan UMKM yang dijalankan pemerintah tidak bisa berjalan sendiri melainkan membutuhkan elemen-elemen lain baik dari masyarakat itu sendiri ataupun dari pihak swasta. Untuk menyatukan semua *stakeholder* yang terlibat maka dibutuhkan koordinasi. Disdagkoperin menjalankan perannya sebagai koordinator agar tercapai semua tujuan yang diharapkan dengan adanya kesamaan tindakan. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah yang dijalankan oleh Disdagkoperin Kota Cimahi sudah tercapai dengan baik melalui perannya sebagai koordinator. Karena, apabila adanya koordinasi yang salah, apa yang diterima para pelaku UMKM tidak sesuai dengan apa

yang disampaikan pemerintah bahkan bertentangan antar elemen, maka tujuan dari pemberdayaan tidak akan tercapai dengan baik.

Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan UMKM Sebagai Fasilitator

Pada umumnya, pemerintah menjadi fasilitator akan memiliki tugas untuk memberikan bantuan agar masyarakat mampu memahami dan memecahkan permasalahannya. Bukan hanya diberikan pelatihan, bimbingan dan nasihat. Namun, mampu menjadi narasumber yang baik atas permasalahan yang para pelaku UMKM alami di masa pandemi Covid-19 ini.

Banyak hal yang dilakukan oleh Disdagkoperin untuk memfasilitasi para pelaku UMKM pada masa pandemi Covid-19, mulai dari fasilitasi legalitas para pelaku usaha, pelatihan, membuka jalan hubungan dengan pihak swasta agar masyarakat dapat mengembangkan usahanya. Fasilitasi yang diberikan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Cimahi kepada para pelaku usaha mikro, diantaranya sebagai berikut :

1. Pelatihan

a) Pelatihan Teknis Khusus pembuatan APD

Disdagkoperin mencari cara agar para pelaku usaha dapat melanjutkan usahanya, diantaranya dengan memberikan pelatihan. Sebagai bentuk adaptasi dan melihat peluang pasar pada masa pandemi Covid-19 ini, Disdagkoperin mengadakan pelatihan segala kebutuhan dalam protokol kesehatan seperti pembuatan Alat Pelindung Diri, Masker Motif Batik, *Face Shield* dan *Hand Sanitizer* sebagaimana yang disampaikan oleh

Adanya gerakan secara positif yang dibuat oleh Disdagkoperin Kota Cimahi untuk membantu para pelaku usaha yang

terpuruk untuk perlahan beralih usahanya kepada barang-barang yang dibutuhkan pada masa pandemi Covid-19. Selain memberikan pelatihan, Disdagkoperin juga melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan profesional untuk lebih mengetahui standarisasi dari produk tersebut agar sesuai SNI dan agar dapat memasarkannya secara langsung.

b) Pelatihan Substansial Berdasarkan Potensi Kelurahan

Konteks pelatihan memang sangat identik dengan peran fasilitator dalam pemberdayaan pelaku usaha termasuk yang dilakukan oleh Disdagkoperin Kota Cimahi. Pelatihan yang diberikan selain pelatihan teknis pembuatan kebutuhan APD yang dibutuhkan pada masa pandemi Covid-19 yang dibahas sebelumnya, terdapat juga pelatihan lainnya. Kali ini pelatihan tersebut terfokus pada potensi-potensi yang ada dari masing-masing kelurahan yang ada di Kota Cimahi.

Pelaku UMKM bisa saling membagikan tips-tips dan caranya untuk terus bertahan dan berkembang usahanya pada masa pandemi. Pelaku usaha yang dianggap dapat bertahan pada masa pandemi, membagikan ilmu dan pengalamannya kepada para pelaku UMKM lainnya, hal tersebut akan membuat para pelaku usaha lainnya termotivasi dan mau belajar lagi.

Dengan fasilitasi melalui pelatihan, pelaku UMKM yang satu dapat membantu para pelaku usaha lainnya. Dengan harapan adanya manfaat yang dapat diambil dan pelaku UMKM tidak canggung dalam belajar dan bertanya, karena dibanyak kejadian rata-rata para pelaku UMKM pasif di dalam pelatihan karena segan untuk bertanya. Namun,

apabila narasumbernya berasal dari sesama UMKM, diharapkan kedekatan lebih terjalin dan ilmu lebih mudah diserap.

c) Pelatihan Digital Marketing

Tidak dapat dipungkiri bahwa pandemi Covid-19 memberikan dampak perubahan pola perilaku hidup masyarakat, yang semula banyak dilakukan secara tradisional dengan bertatap muka secara langsung. Namun, setelah adanya pandemi Covid-19, perlahan semua berubah menjadi *modern* dengan cara *online*. Hal tersebut juga terjadi pada transaksi jual beli yang dilakukan para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang ada di Kota Cimahi. Untuk menyesuaikan kebutuhan para pelaku UMKM dalam menjalan usahanya, konsep pelatihan yang diberikan oleh Disdagkoperin juga mengalami perubahan yang adaptif. Sehingga, masyarakat terus mampu menyesuaikan dengan perkembangan yang ada dengan diberikannya pelatihan yang sesuai.

d) Pelatihan design & design kemasan

Dalam memasarkan produk secara *online*, tentunya dibutuhkan cara dan teknik tersendiri agar calon konsumen dapat tertarik melihat iklan yang disebarluaskan yang pada akhirnya diharapkan bisa membeli produk dari para pelaku usaha. Untuk membuat iklan yang menarik minat para calon konsumen, pelaku usaha diwajibkan untuk membuat konten dengan design yang menarik pula. Selain itu, para konsumen juga akan lebih berminat untuk membeli produk apabila produk tersebut dikemas secara baik dan menarik. Semua hal tersebut diperlukan kemampuan yang akan membuat produk

UMKM lebih laku dipasaran. Melihat hal tersebut merupakan sebuah kebutuhan para pelaku UMKM di era modern ini, maka Disdagkoperin juga membuat pelatihan untuk membuat design dan design kemasan.

Produk dengan kemasan yang sudah baik dari kualitas ketahanan dan juga dari design, akan membuat produk tersebut bisa dipasarkan dengan jangkauan yang lebih luas lagi, akan bisa memasuki pasar-pasar perdagangan yang lebih besar lagi. Sehingga diharapkan para UMKM akan terus naik kelas.

2. Fasilitasi legalitas UMKM

Pentingnya legalitas dari setiap UMKM agar kedepannya mereka lebih siap bersaing dengan para kompetitor yang ada diluaran. Legalitas yang diperlukan oleh para pelaku UMKM itu bermacam-macam tidak hanya Izin Berusaha saja. Legalitas yang dibutuhkan diantaranya ada NIB (Nomor Induk Berusaha), Perizinan P-IRT (Pangan-Industri Rumah Tangga), Sertifikasi Halal, HAKI (Hak Kekayaan Intelektual, Hak Merk, dan lain-lain), Izin Edar BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan), dan lain-lainnya. Dari puluhan ribu UMKM yang ada di Kota Cimahi, yang terdaftar sudah memiliki NIB ialah sebanyak 8086 UMKM. Hal tersebut tentunya masih belum memenuhi target karena jumlah UMKM di Kota Cimahi berdasarkan jumlah pendaftar program BPUM (Bantuan Produktif Usaha Mikro) yang diselenggarakan pemerintah pusat mencapai 44.000 UMKM. Hal tersebut tentunya masih menjadi tugas dari Disdagkoperin Cimahi untuk terus mengedukasi masyarakat agar memiliki izin usaha dan bisa memperbaiki data UMKM yang ada agar lebih sesuai.

Agar dapat bersaing kuat di dunia luar terlebih pada masa pandemi Covid-19 harus lebih matang mempersiapkan bisnisnya

mulai dari pengetahuan para pemilik usaha mengenai dunia usaha, keterbukaan terhadap perubahan dan pembaharuan teknologi, perbaikan dalam *branding* produk yang dapat dilihat dari kemasan, serta pemenuhan legalitas-legalitas sebagai penunjang agar UMKM dapat mengjangkau pasar yang lebih jauh dan lebih besar. Semua itu sudah diberikan fasilitasi oleh Disdagkoperin, dengan begitu dapat dikatakan bahwa pemberdayaan UMKM pada masa pandemi Covid-19 di Kota Cimahi sudah tercapai dengan baik.

Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan UMKM Sebagai Stimulator

Stimulator bukan hanya menghidupkan kembali usaha-usaha yang mulai tenggelam pada masa pandemi Covid-19 melainkan menumbuhkan juga peluang usaha-usaha yang lainnya. Di Kota Cimahi sendiri, seperti yang telah dibahas pada pembahasan sebelumnya, banyak sekali UMKM yang terancam bangkrut bahkan sudah gulung tikar. Melalui keadaan tersebut Disdagkoperin membuat sebuah kebijakan. Kebijakan bagi usaha kecil yang bisa dilakukan sebagai wujudnya menjadi stimulator salah satunya dengan pemberian modal kepada para pelaku UMKM terdampak Covid-19.

Disdagkoperin memberikan bantuan uang tunai, namun tidak serta merta memberikannya begitu saja kepada para pelaku usaha. Bantuan tersebut dikemas dalam program perlombaan kreativitas UMKM yang diikuti para pelaku usaha secara berkelompok. Harapan dari terlaksananya program lomba kreativitas ini, bisa memunculkan semangat para pelaku usaha untuk senantiasa terus berinovasi dan berkreasi. Peserta dibentuk secara berkelompok agar antar pelaku usaha bisa saling menyumbangkan ide pemikiran, saling

menyemangati dan saling memotivasi sehingga pada akhirnya bisa maju bersama.

Lomba kreativitas UMKM yang diselenggarakan Disdagkoperin Kota Cimahi dinamakan *Cimahi Small Business Innovation Competition* (CSBI Competition). Dalam lomba ini para pelaku usaha diseleksi dalam beberapa tahap. Seleksi tersebut dilakukan mulai dari survei ke lapangan, penyerahan dokumen-dokumen fisik kelengkapan UMKM. Ada sebanyak 77 kelompok UMKM dengan total 477 UMKM yang lolos seleksi tahap verifikasi proposal. Kemudian dilakukan tahap penjurian dan pemenangnya akan mendapatkan uang tunai sebagai modal usaha dengan total hadiah senilai Rp. 2.500.000.000 (dua setengah milyar rupiah) yang akan diberikan kepada 100 pemenang. UMKM yang Juara 1 akan mendapatkan hadiah 50 juta rupiah untuk 10 pemenang, Juara 2 akan mendapatkan 30 juta rupiah untuk 25 pemenang dan juara 3 akan mendapatkan 30 juta untuk 65 pemenang. Tidak berhenti disitu, agar hadiah yang diberikan dapat dikelola dengan baik dan benar-benar dipergunakan untuk modal usaha agar lebih berkembang.

Disdagkoperin Kota Cimahi melakukan pendampingan kepada para pelaku usaha yang memenangkan *CSBI Competition* sehingga uang tunai dari hadiah yang mereka terima dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk membangun dan mengembangkan usaha mereka dimasa pandemi Covid-19. Melalui pendampingan dan pembinaan tersebut, para pelaku usaha difasilitasi untuk perkembangan usahanya. Fasilitasi yang diberikan mulai dari penambahan wawasan pengetahuan bisnis, manajemen Sumber Daya Manusianya, dari segi produksi barang yang dihasilkan, kemudian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan cara pemasaran produk hingga pada akhirnya bisa melakukan *business matching*.

CSBI Competition memberikan dampak positif dalam perkembangan UMKM pada masa pandemi Covid-19, dibuktikan dengan adanya 100 usaha yang terbantu yang merupakan pemenang dari CSBI Competition tersebut.

Identifikasi Analisis SWOT Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan UMKM pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2021 di Kota Cimahi (Studi pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Cimahi)

Identifikasi SWOT (*Strenght, Weakness, Opportunity, Threat*) merupakan teknik yang digunakan untuk menentukan sebuah strategi dengan mengidentifikasi faktor-faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi peran pemerintah dalam pemberdayaan UMKM pada masa Pandemi Covid-19 di Kota Cimahi pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Cimahi. Berikut merupakan paparan SWOT secara sederhana:

Kekuatan (Strength)

1. Terdapat tenaga ahli yang kompeten
2. Tersedianya anggaran yang berasal dari Dana Intensif Daerah
3. Evaluasi program pembinaan dan pendampingan UMKM secara berkesinambungan

Kelemahan (Weakness)

1. Belum semua masyarakat mau mengikuti program pemerintah
2. Masyarakat banyak yang tidak memahami teknologi
3. Terbatasnya SDM tenaga ahli
4. Kurangnya dukungan APBD dalam program pemberdayaan UMKM pada masa pandemi Covid-19
5. Data jumlah UMKM yang belum pasti

Peluang (Opportunity)

1. Adanya dukungan dari pelaku UMKM
2. Percepatan teknologi

Ancaman (Threat)

1. Berubah-ubahnya aturan pada masa pandemi Covid-19.

Upaya Alternatif Terhadap Hasil Identifikasi SWOT dalam Implementasi Program Buruan SAE (Sehat, Alami, Ekonomis) di Kota Bandung Pada Tahun 2020-2021

Berdasarkan pemaparan identifikasi SWOT (kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman) dalam peran pemerintah dalam pemberdayaan UMKM pada masa Pandemi Covid-19 di Kota Cimahi di atas, peneliti menyusun beberapa strategi dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:

a. Strategi SO (Strength – Opportunity)

1. Menyediakan tenaga ahli untuk membuat program cara membuat konten promosi yang akan membantu para pelaku UMKM dalam memasarkan produk di media sosial agar lebih menarik, karena dalam *digital marketing*, konten adalah kunci.
2. Dengan adanya teknologi dapat dimanfaatkan untuk menyediakan *platform* khusus penjualan bagi produk UMKM yang ada di Kota Cimahi. Sehingga semua produk UMKM dari Kota Cimahi terhimpun dan bisa dilihat dalam satu *platform* agar memudahkan jual-beli.
3. Optimalisasi evaluasi dengan melibatkan lebih banyak pelaku usaha bukan hanya koordinator UMKM atau hanya pendamping saja. Sehingga Disdagkoperin dapat langsung mendengar aspirasi dan pendapat dari pelaku UMKM

b. Strategi ST (Strength – Threat)

Dalam evaluasi program pembinaan dan pendampingan harus mampu memprediksi perubahan-perubahan aturan yang terjadi pada masa pandemi Covid-19

c. Strategi WO (Weakness – Opportunity)

1. Memberikan motivasi yang dapat menggerakkan masyarakat pelaku UMKM untuk bergerak bersama dalam perubahan-perubahan teknologi, sehingga bersama-sama lebih beradaptasi dan dapat memanfaatkan perubahan teknologi yang ada.
2. Memberikan motivasi yang dapat masyarakat pelaku usaha yang aktif untuk mengajak dan mensosialisasikan program bantuan yang diselenggarakan pemerintah kepada sesama pelaku UMKM yang belum mengikuti program bantuan dari pemerintah, agar manfaatnya semakin dirasakan menyebar ke para pelaku usaha yang ada di Kota Cimahi tidak hanya sebagian kelompok saja
3. Membuat sistem pendataan yang lebih mudah dan efektif dengan memanfaatkan teknologi agar pelaku UMKM dapat terdata dengan baik. Pada akhirnya dapat dilakukan pemetaan dengan maksimal
4. Membuat program *sharing session* dimana pelaku usaha yang lebih maju usahanya dapat berbagi ilmu kepada pelaku usaha yang lain dengan mengelompokkan UMKM sesuai dengan jenis usahanya agar kegiatan lebih efektif

d. Strategi WT (Weakness – Threat)

Membuat program pemberdayaan yang dapat dilakukan secara *hybrid* dengan memerhatikan penggunaan *platform* sederhana agar mudah diikuti masyarakat pelaku usaha

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan pembahasan yang penulis lakukan mengenai Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2021 di Kota Cimahi dapat disimpulkan bahwa :

1. Pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah pada masa pandemi Covid-19 di Kota Cimahi yang dilakukan dengan cara memfasilitasi para pelaku usaha baru dalam program WUB (Wirausaha Baru) sudah berjalan dengan baik yang merupakan wujud pemerintah dalam memenuhi perannya menjadi *entrepreneur*. Para pelaku usaha baru menjadi lebih mengetahui langkah-langkah apa saja yang harus dipersiapkan dan dilakukan apabila ingin membuka usaha pada masa pandemi Covid-19 dan langkah yang bisa ditempuh dalam mengembangkan usahanya. Dalam arti, para pelaku usaha telah melaksanakan pendampingan yang difasilitasi oleh pemerintah. tersebut menunjukkan bahwa peran Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian Kota Cimahi dalam memberdayakan usaha mikro kecil dan menengah sebagai *entrepreneur* pada masa pandemi Covid-19 ini sudah tercapai dengan baik
2. Sebagai upaya memenuhi perannya sebagai koordinator, Disdagkoperin Kota Cimahi menetapkan koordinator-koordinator dari UMKM yang ada di kelurahan untuk membantu tugasnya dalam melakukan pemberdayaan UMKM. Dengan adanya kordinator per kelurahan, yang semula kesulitan dalam menyampaikan informasi menjadi lebih mudah dan cepat sampai kepada para pelaku usaha lainnya. Para pelaku usaha juga dengan mudah dapat menyampaikan aspirasi dan pendapatnya mengenai program UMKM kepada Disdagkoperin melalui koordinator. Sehingga alur kordinasi terjalin dengan baik. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa

pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah yang dijalankan oleh Disdagkoperin Kota Cimahi sudah tercapai dengan baik melalui perannya sebagai koordinator.

3. Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah yang dilakukan Disdagkoperin pada masa pandemi Covid-19 dengan menjalankan perannya sebagai fasilitator dapat dikatakan sangat baik. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya fasilitasi-fasilitasi yang diselenggarakan oleh disdagkoperin, mulai dari pelatihan-pelatihan dengan materi-materi tertentu yang menyesuaikan dengan konten yang menyesuaikan keadaan pada masa pandemi Covid-19. Kemudian juga dengan adanya fasilitasi legalitas usaha bagi para pelaku usaha. Melihat semakin banyaknya para pelaku usaha yang memiliki izin, terlengkapi legalitas usahanya dan juga ada perkembangan dari kualitas usaha membuktikan bahwa Disdagkoperin dengan baik berperan sebagai fasilitator dalam pemberdayaan UMKM pada masa pandemi Covid-19

4. Peran sebagai stimulator menjadikan Disdagkoperin melakukan langkah-langkah yang dapat menstimulus para pelaku UMKM untuk senantiasa bangkit pada masa pandemi Covid-19 sudah dilakukan dengan baik. Disdagkoperin memberikan bantuan uang tunai yang dikemas sebagai hadiah dalam sebuah perlombaan inovasi dan kreasi dari para pelaku UMKM yang kemudian juga dilakukan pembinaan kepada para pelaku UMKM yang memenangkan lomba. Dari program ini terdapat 100 usaha yang menang dan dapat mempergunakan hadiahnya sebagai modal untuk bangkit juga mengembangkan usaha pada masa pandemi Covid-19.

5. Faktor-faktor pendukung dan penghambat yang dilihat dari kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman peran

Disdagkoperin dalam melakukan pemberdayaan UMKM pada masa pandemi Covid-19 masih dapat dikatakan seimbang, sehingga Disdagkoperin Kota Cimahi dapat merumuskan kebijakan dalam pemberdayaan UMKM pada masa pandemi Covid-19 untuk lebih optimal.

6. Upaya yang dapat dilakukan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustri Kota Cimahi dengan meninjau aspek kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman berdasarkan hasil identifikasi SWOT adalah melakukan pelatihan dan pendampingan secara berjenjang kepada para pelaku UMKM sesuai dengan kategorinya yang dilihat berdasarkan progress usahanya sehingga dapat meningkatkan kualitas UMKM yang akan berpengaruh juga pada pendapatannya dan membuat UMKM bisa bertahan dalam kondisi apapun.

REFERENSI

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Peraturan Walikota Cimahi Nomor 42 Tahun 2015 tentang Izin Usaha

Soares, A., Nurpratiwi, R & Makmur, M. (2015). *Peranan Pemerintah Daerah Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah*. 4(2): 231-236

Widanarto, A (2014) *Peran Pemerintah Kota Cimahi Dalam Program Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)*.

https://www.kemenkopukm.go.id/uploads/laporan/1617162002_SANDINGAN_D

ATA_UMKM_2018-2019.pdf Diakses
pada tanggal 14 Juli 2021

<https://katadata.co.id/agustiyanti/finansial/605d9f635fdf7/hanya-12-5-umkm-di-indonesia-yang-kebal-dari-pandemi-covid-19> Diakses pada tanggal 26 Mei 2021 Pukul 16.05 WIB.

<https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5584190/gegara-pandemi-covid-19-13-ribu-umkm-di-cimahi-gulung-tikar>

Diakses tanggal 27 Mei 2021 Pukul
14.22 WIB

ACKNOWLEDGMENT

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan perindustrian Kota Cimahi dan beberapa informan masyarakat yang telah mendukung membantu dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian serta telah memberikan data dan informasi yang dibutuhkan.